



Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Gresik Sebagai Upaya Menuju Kabupaten Hijau

Aditya Hermansyah¹⁾, Ulul Albab²⁾, Zainal Fatah³⁾, Ika Devy Pramudiana⁴⁾

^{1), 2), 3), 4)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: ika.devy@unitomo.ac.id

ABSTRACT. Community-based waste management is a strategic step toward achieving sustainable development in Gresik Regency, Indonesia. This policy aims to reduce waste volume, raise community awareness, and support the vision of a Green Regency. This study evaluates the implementation and effectiveness of community-based waste management policies using a qualitative case study approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed thematically to identify supporting and hindering factors influencing program success. The findings indicate that while progress has been made, significant challenges remain, including low levels of socialization, limited infrastructure, and weak inter-agency coordination. Community participation depends heavily on local leaders and facilitators, and the sustainability of institutions such as waste banks and management groups has yet to be evenly distributed. Adequate infrastructure, such as integrated waste processing facilities (TPS3R), is crucial and needs enhancement. Barriers like a lack of technical experts, cultural habits of indiscriminate waste disposal, and insufficient funding hinder the achievement of policy objectives. This evaluation underscores the necessity for increased education, institutional strengthening, and improved infrastructure to accelerate behavioral change and boost community participation. The results are expected to inform local government strategies for more effective implementation toward realizing a sustainable and environmentally friendly Gresik. An integrated and holistic approach is essential for optimizing waste management, creating a cleaner, healthier, and sustainable environment.

Keywords: Community-based waste management, sustainability, public participation, Gresik, environmental policy, program evaluation, infrastructure, behavioral change.

ABSTRAK. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan langkah strategis dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik, Indonesia. Kebijakan ini dikembangkan untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung visi Kabupaten Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data dikumpulkan dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan besar masih dihadapi, termasuk rendahnya tingkat sosialisasi, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kelemahan koordinasi antar lembaga. Partisipasi masyarakat bergantung pada tokoh lokal dan pendamping, sementara keberhasilan kelembagaan seperti bank sampah dan kelompok pengelola masih belum merata. Infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPS3R), juga menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan tenaga ahli, budaya membuang sampah sembarangan, dan kurangnya dukungan anggaran menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Evaluasi ini menegaskan perlunya peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, serta infrastruktur yang memadai untuk mempercepat perubahan perilaku dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif guna mencapai visi Kabupaten Hijau secara berkelanjutan. Melalui pendekatan holistik dan terintegrasi, diharapkan pengelolaan sampah dapat lebih optimal, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Keberlanjutan, Partisipasi Publik, Gresik, Kebijakan Lingkungan, Evaluasi Program, Infrastruktur, Perubahan Perilaku.

1. LATAR BELAKANG

Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Gresik sebagai Upaya Menuju Kabupaten Hijau Isu pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Gresik

(Zatillah & Mubarak, 2025). Sebagai salah satu sentra industri di Jawa Timur, Gresik mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat, berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan (Hadamuan & Tuti, 2022). Data menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang efektif, timbunan sampah akan terus melonjak, membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan masyarakat (Ardiansyah et al., 2024)(Adnyana et al., 2023)(Mursalin, 2024). Kondisi ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar penanganan di hilir, melainkan juga melibatkan upaya pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Secara nasional, arah kebijakan pengelolaan sampah telah bergeser dari pendekatan linear (kumpul-angkut-buang) menuju ekonomi sirkular yang menekankan pada 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Mertayani et al., 2025). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah (Mariane et al., 2025). Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang melibatkan komunitas, seperti bank sampah, komposting, dan pusat daur ulang skala rumah tangga (Nanda et al., 2024).

**TABEL 1: PROFIL DATA DAN KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN GRESIK**

No	Data/ Fakta	Keterangan
1	Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Gresik	Menyebabkan volume sampah semakin meningkat, meningkatkan beban di TPA dan lingkungan sekitar.
2	Data sampah di Gresik	Volume sampah yang terus meningkat tanpa intervensi efektif beresiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3	Status kebijakan nasional	Peralihan dari pendekatan linear ke ekonomi sirkular menekan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
4	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008	Menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

5	Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik	Meliputi pembentukan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan organik, kampanye edukasi, dan pusat daur ulang rumah tangga.
6	Kendala dalam pelaksanaan program	Kurangnya pemahaman masyarakat, sarana prasarana terbatas, koordinasi yang belum optimal, keberlanjutan program terganggu.
7	Tujuan utama kebijakan dan program di Gresik	Meningkatkan pengurangan volume sampah, daur ulang, membangun kesadaran masyarakat, dan mewujudkan Kabupaten Hijau.

(SUMBER PENELITIAN 2025)

Kabupaten Gresik, menyadari urgensi ini, telah berupaya mengimplementasikan berbagai kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Abdillah & Kurniawan, 2020). Inisiatif-inisiatif ini muncul dari pemahaman bahwa masyarakat bukan hanya sebagai penghasil sampah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang paling dekat dengan sumber masalah (Putra et al., 2022). Berbagai program telah diluncurkan, mulai dari pembentukan kelompok bank sampah di tingkat desa/kelurahan, pelatihan pengolahan sampah organik menjadi kompos, hingga kampanye edukasi tentang pemilahan sampah (Sari & Megawati, 2024). Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, meningkatkan nilai ekonomis sampah melalui daur ulang, dan menumbuhkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan (Aulia et al., 2023). Namun, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala kerap muncul di lapangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, koordinasi antarpihak yang belum optimal, serta keberlanjutan program setelah inisiasi awal (Hamim et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan sebuah evaluasi kebijakan yang sistematis dan mendalam. Evaluasi ini krusial untuk mengukur sejauh mana efektivitas program yang telah berjalan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa mendatang (Adicita et al., 2023).

Kusumaningtyas et al. (2025), Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program semata,

melainkan juga untuk meninjau kontribusinya terhadap visi yang lebih besar menuju Kabupaten Hijau. Konsep Kabupaten Hijau mencakup berbagai aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif, kualitas udara dan air yang baik, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan ruang terbuka hijau (Soeharsono et al., 2023). Dalam konteks pengelolaan sampah, Kabupaten Hijau berarti mencapai tingkat daur ulang dan pengurangan sampah yang signifikan, meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan, dan membangun masyarakat yang sadar lingkungan serta bertanggung jawab atas sampahnya sendiri (Tuhumury et al., 2024). Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan telah memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di tingkat komunitas, dan pengurangan beban TPA secara signifikan. Selain itu, evaluasi ini juga akan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan program (Nuraini et al., 2024).

Kambio & Saputra (2024), Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk merumuskan kembali strategi, memperbaiki implementasi program, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien guna mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan mewujudkan Kabupaten Gresik yang lebih hijau dan lestari. Menurut Wafa & Angin (2024), Pentingnya evaluasi ini juga terletak pada aspek akuntabilitas publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat dan program yang dijalankan oleh pemerintah memberikan manfaat (Sitoresmi & Karmilah, 2025). Dengan evaluasi yang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sampah dapat meningkat, mendorong partisipasi yang lebih besar di masa mendatang.

Latar belakang ini menekankan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik bukan sekadar tinjauan administratif, melainkan sebuah investasi strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, Gresik dapat belajar dari pengalaman, mengidentifikasi praktik terbaik, dan merancang masa depan yang lebih bersih, sehat, dan hijau bagi seluruh warganya.

2. LANDASAN TEORI

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gresik, telah menjadi isu krusial seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Volume sampah yang terus meningkat menyebabkan tekanan besar pada lingkungan dan infrastruktur pengolahan sampah (Anugerah et al., 2024). Menyadari hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik telah

mengadopsi berbagai kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti program bank sampah dan pelatihan pengolahan sampah organik. Mardius et al. (2024), Inisiatif-inisiatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya, sehingga meringankan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, efektivitas dan keberlanjutan kebijakan-kebijakan ini perlu dievaluasi secara mendalam (Asshiddiqy & Fikri, 2024). Berbagai tantangan di lapangan, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan fasilitas, dan masalah koordinasi, seringkali menghambat implementasi program. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini menjadi sangat penting. Tujuannya bukan hanya untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi area perbaikan, merumuskan rekomendasi, dan pada akhirnya, berkontribusi pada visi besar Kabupaten Gresik menuju Kabupaten Hijau. Sebuah kabupaten yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan akan terwujud melalui pengelolaan sampah yang efektif dan partisipasi masyarakat yang kuat (Widiyaningrum et al., 2025). Studi ini berlandaskan pada beberapa teori utama yang saling terkait, mencakup teori kebijakan publik, teori pengelolaan sampah berkelanjutan, teori partisipasi masyarakat, dan konsep Kabupaten Hijau.

Teori Kebijakan Publik

Dalam konteks evaluasi kebijakan, kita mengacu pada model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli seperti William N. Dunn atau Edward S. Quade (Setyoprambudi et al., 2025). Model ini menekankan pentingnya menilai berbagai aspek kebijakan, mulai dari efektivitas (apakah tujuan tercapai?), efisiensi (hubungan antara input dan output), relevansi (kesesuaian dengan masalah yang ada), kecukupan (apakah output cukup untuk mengatasi masalah), hingga pemerataan (distribusi manfaat dan biaya). Naziyah & Arif (2023), Evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah intervensi pemerintah yang dirancang untuk mengubah perilaku dan praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas.

Teori Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pendekatan ini berakar pada konsep pembangunan berkelanjutan yang didefinisikan oleh Bruntland Report, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Haryadi et al., 2025). Dalam pengelolaan sampah, keberlanjutan berarti meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan sosial, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Ini mencakup hirarki pengelolaan sampah: pencegahan, pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), daur ulang (recycle), pemulihan energi, dan terakhir pembuangan

akhir yang aman. Hasibuan et al. (2023), Kebijakan berbasis masyarakat secara khusus berfokus pada tahapan awal, yaitu pengurangan dan daur ulang di tingkat sumber, yang merupakan kunci keberlanjutan.

Teori Partisipasi Masyarakat

Teori partisipasi masyarakat sangat relevan mengingat fokus kebijakan pada komunitas. Sherry R. Arnstein dengan "Ladder of Citizen Participation" mengemukakan tingkatan partisipasi dari non-partisipasi hingga kontrol warga (Rahma & Jumiati, 2025). Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi yang efektif berarti masyarakat tidak hanya sebagai objek program, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tingkat partisipasi yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh bank sampah atau komunitas pengolah sampah, seringkali berkorelasi dengan keberhasilan program karena adanya rasa memiliki (*sense of ownership*) dan inisiatif lokal. Partisipasi ini mendorong perubahan perilaku kolektif yang esensial untuk pengurangan sampah dari sumber.

Konsep Kabupaten Hijau

Nursalam et al. (2024), Konsep Kabupaten Hijau (Green Regency) merupakan visi pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap sektor pembangunan daerah. Meskipun tidak ada definisi tunggal yang baku, Kabupaten Hijau umumnya mencakup indikator seperti kualitas lingkungan hidup yang baik (udara, air, tanah), pengelolaan sumber daya alam yang lestari, rendah emisi karbon, dan masyarakat yang sadar lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sampah, Kabupaten Hijau dicirikan oleh: 1) tingkat daur ulang yang tinggi, 2) pengurangan volume sampah yang signifikan menuju TPA, 3) minimalisasi pencemaran akibat sampah, dan 4) partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah salah satu pilar utama untuk mencapai visi ini, karena secara langsung berkontribusi pada pengurangan beban lingkungan dan peningkatan kualitas hidup.

3. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Gresik sebagai Upaya Menuju Kabupaten Hijau" didasarkan pada pendekatan interpretatif yang mendalam untuk memahami kondisi, tantangan, dan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dari perspektif para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Menurut para ahli, metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti melalui data yang bersifat deskriptif dan naratif. Maskuri et al. (2020) menyatakan bahwa metode ini

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh responden terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah lokal, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, serta masyarakat umum sebagai informan utama.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang utama meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan subjektif para pemangku kebijakan dan masyarakat terkait efektivitas, kendala, dan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Menurut Wea et al. (2024), wawancara mendalam mampu menangkap nuansa dan konteks yang tidak bisa diperoleh melalui data kuantitatif. Observasi partisipatif dilakukan selama kegiatan program pengelolaan sampah berlangsung guna memahami langsung proses kegiatan di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat, serta tantangan yang muncul secara nyata. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung seperti laporan resmi, kebijakan tertulis, laporan evaluasi, serta data statistik yang relevan selama pelaksanaan program. Teknik ini membantu memperkuat validitas data terkait implementasi kebijakan dan pencapaian target yang telah ditetapkan .

Dalam analisis data, peneliti mengikuti pendekatan analisis tematik yang dikembangkan oleh Sari & Megawati (2024). Data dari wawancara, observasi, dan dokumen diorganisasi ke dalam tema-tema utama seperti efektivitas kebijakan, partisipasi masyarakat, hambatan, dan faktor pendukung keberhasilan program. Melalui proses ini, peneliti mampu mengidentifikasi pola dan makna yang muncul secara konsisten dari berbagai sumber data. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengonfirmasi temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini sesuai dengan pendapat Labibah & Pulungan (2025), yang menyatakan bahwa triangulasi dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Metode penelitian kualitatif ini dirancang untuk memahami secara komprehensif proses evaluasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan visi Kabupaten Hijau. Pendekatan ini memberikan gambaran mendalam tentang dinamika dan persepsi yang tidak dapat diungkapkan melalui data kuantitatif semata, sehingga mampu memberikan rekomendasi berbasis konteks nyata untuk peningkatan keberlanjutan program pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri seperti Kabupaten Gresik. Seiring dengan meningkatnya volume sampah setiap tahunnya, dibutuhkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat menjadi salah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan sekaligus membangun budaya hidup bersih dan berwawasan lingkungan.

Kabupaten Gresik sebagai daerah yang sedang menuju predikat "Kabupaten Hijau" telah menerapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, termasuk pengembangan program bank sampah, pemilahan sampah dari rumah, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala lokal seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle). Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut. Kabupaten Gresik sebagai daerah yang sedang menuju predikat "Kabupaten Hijau" telah menerapkan berbagai kebijakan terkait pengelolaan sampah, termasuk pengembangan program bank sampah, pemilahan sampah dari rumah, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah skala lokal seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle). Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan ini sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya evaluasi kebijakan dengan pendekatan kualitatif, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat diimplementasikan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari sudut pandang para pelaku kebijakan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program, termasuk aspek sosial, budaya, teknis, dan administratif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci seperti petugas dinas lingkungan hidup, tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, dan warga yang terlibat dalam program. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan

untuk melihat secara langsung proses pengelolaan sampah, interaksi antar pemangku kepentingan, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan kegiatan (Aisah et al., 2024). Dokumentasi berbagai kebijakan, laporan kegiatan, serta data capaian juga dianalisis untuk memperkuat temuan dari lapangan.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan pendekatan tematik dengan cara mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara iteratif, yakni melalui pembacaan berulang, pengkodean, dan interpretasi makna di balik data yang diperoleh. Hasil analisis ini selanjutnya diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan, partisipasi masyarakat, peran kelembagaan, serta tantangan teknis dan sosial yang dihadapi. Pada bagian berikut, akan disajikan temuan-temuan utama dari lapangan yang dirangkum dalam bentuk tabel. Tabel ini menggambarkan kondisi aktual implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik, yang mencakup berbagai aspek seperti sosialisasi, kelembagaan, partisipasi, infrastruktur, hingga kendala yang dihadapi. Informasi ini menjadi dasar penting dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan dalam mendukung visi Gresik sebagai Kabupaten Hijau.

Tabel 2: Kondisi Lapangan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Gresik

Aspek	Temuan
Sosialisasi dan Edukasi	Masih terbatas; sebagian besar warga belum memahami peran mereka dalam sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Kelembagaan	Adanya Bank Sampah dan kelompok pengelola sampah di beberapa desa/kelurahan, namun belum merata dan kurang dukungan teknis.
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi aktif hanya di wilayah tertentu; dipengaruhi oleh tokoh masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan.
Dukungan Pemerintah Daerah	Kebijakan sudah ada (Perda/SK), tetapi implementasi kurang maksimal karena keterbatasan anggaran dan monitoring yang lemah.

Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS3R masih minim dan tidak semua desa memiliki akses.
Kendala Teknis dan Sosial	Kurangnya tenaga ahli, konflik peran antarinstansi, serta budaya buang sampah sembarangan masih kuat

(sumber penelitian 2025)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meskipun telah menunjukkan beberapa kemajuan di tingkat lokal. Salah satu aspek yang paling menonjol adalah masih terbatasnya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Banyak warga belum sepenuhnya memahami tujuan dan mekanisme pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tingkat kesadaran dan keterlibatan mereka masih rendah.

Dari sisi kelembagaan, beberapa desa telah membentuk bank sampah dan kelompok pengelola, namun keberadaan lembaga ini belum merata dan belum sepenuhnya didukung oleh pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kinerja kelembagaan yang belum optimal, terutama dalam hal pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat, meskipun ada di beberapa wilayah, sangat dipengaruhi oleh peran tokoh lokal dan pendamping dari lembaga swadaya masyarakat. Tanpa kehadiran aktor-aktor penggerak tersebut, keterlibatan masyarakat cenderung pasif. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kesadaran kolektif masih sangat bergantung pada pendekatan personal dan komunitas.

Dari sisi dukungan pemerintah daerah, meskipun terdapat kebijakan formal yang mendasari pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti perda dan surat keputusan, pelaksanaannya belum maksimal. Masalah umum seperti keterbatasan anggaran, kurangnya monitoring, serta lemahnya sinergi antarinstansi menjadi penghambat utama. Keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya fasilitas TPS3R dan peralatan pengelolaan sampah juga menjadi kendala penting. Selain itu, tantangan teknis dan sosial seperti kurangnya tenaga ahli dan masih kuatnya budaya membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya tercapai. Secara umum, meskipun terdapat inisiatif dan kebijakan yang mendukung, implementasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik masih memerlukan penguatan dari sisi edukasi, kelembagaan, partisipasi, dan dukungan infrastruktur agar tujuan menuju "Kabupaten Hijau" dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Setelah memaparkan temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik, langkah selanjutnya dalam pembahasan ini adalah melakukan analisis evaluatif secara lebih sistematis. Evaluasi kebijakan menjadi tahap penting untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan berjalan dalam praktik, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga meninjau proses, konteks, serta sumber daya yang mendukung keberlangsungan program. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. Model ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu Context (konteks), Input (masukan), Process (proses), dan Product (hasil). Keempat komponen ini memberikan kerangka yang menyeluruh dalam mengevaluasi kebijakan secara kualitatif, serta membantu mengidentifikasi aspek mana yang sudah berjalan efektif dan aspek mana yang memerlukan perbaikan.

1. **Context** digunakan untuk memahami latar belakang, kebutuhan, dan alasan munculnya kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Gresik. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri yang tinggi telah mendorong peningkatan volume sampah, sehingga diperlukan solusi yang lebih berkelanjutan dan partisipatif. Pemerintah daerah menanggapi tantangan ini dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui program-program berbasis komunitas.
2. **Input** mengevaluasi sumber daya yang tersedia dalam mendukung implementasi kebijakan, seperti regulasi, anggaran, kelembagaan, serta sumber daya manusia. Penelitian menemukan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia secara formal, tantangan masih muncul dalam hal minimnya anggaran, sarana pendukung, dan kurangnya pelatihan teknis kepada pengelola di tingkat lokal.
3. **Process** menilai pelaksanaan kebijakan secara operasional. Aspek ini mencakup mekanisme pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan masih belum berjalan optimal, terutama karena lemahnya koordinasi antarinstansi serta belum terbangunnya sistem monitoring yang konsisten.
4. **Product** mengevaluasi hasil dari kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, yang diamati adalah sejauh mana kebijakan mampu mengurangi volume sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong pengelolaan sampah yang mandiri di tingkat komunitas. Hasilnya menunjukkan bahwa capaian masih terbatas dan belum merata di

seluruh wilayah Gresik, namun beberapa inisiatif lokal menunjukkan potensi besar jika mendapat dukungan yang konsisten.

Penggunaan model CIPP dalam analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran evaluatif yang menyeluruh dan berbasis data lapangan. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor penghambat maupun pendukung implementasi kebijakan, sehingga dapat menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 3 : Penerapan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Gresik Berdasarkan Aspek Cipp(Context,Input,Proces,Product)

Komponen CIPP	Uraian Evaluasi
Context	Tekanan terhadap lingkungan di Gresik meningkat seiring pertumbuhan industri dan urbanisasi; kebutuhan akan kebijakan ramah lingkungan sangat mendesak.
Input	Tersedia dokumen kebijakan, perangkat kelembagaan, dan sebagian SDM; namun alokasi dana dan sarana belum memadai untuk operasionalisasi yang efektif.
Process	Proses pelaksanaan belum sistematis dan terstandar; lemahnya pengawasan dan evaluasi internal dari dinas terkait.
Product	Hasil pengurangan sampah dan peningkatan kesadaran lingkungan belum signifikan; capaian "Kabupaten Hijau" masih dalam tahap awal.

(sumber penelitian 2025)

Berdasarkan hasil evaluasi dengan pendekatan CIPP (Context, Input, Process, Product), kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya komitmen normatif dan inisiatif strategis dari pemerintah daerah, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam hal keberlanjutan, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.

Pada aspek konteks (context), kebijakan ini lahir dari kebutuhan riil akan penanganan sampah yang lebih inklusif dan partisipatif di tengah peningkatan produksi sampah rumah tangga. Adanya visi “Kabupaten Hijau” menjadi dasar penting dalam mendesain pendekatan berbasis masyarakat. Namun demikian, belum semua pihak memiliki pemahaman dan kesadaran yang setara terhadap urgensi kebijakan ini, terutama di tingkat akar rumput. Dari segi masukan (input), evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini didukung oleh regulasi formal

seperti perda dan surat keputusan, serta adanya kemitraan dengan LSM dan komunitas lokal. Namun, kelemahan dalam dukungan anggaran, minimnya pelatihan teknis, dan keterbatasan sarana prasarana menjadi hambatan utama dalam memastikan kesiapan implementasi kebijakan di lapangan.

Pada aspek proses (process), koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat belum berjalan optimal. Meskipun terdapat beberapa program yang berhasil diinisiasi, masih banyak wilayah yang belum terjangkau secara merata. Mekanisme monitoring juga belum sistematis, sehingga evaluasi berkala dan perbaikan program cenderung berjalan lambat. Sementara itu, dari sisi hasil (product), kebijakan ini belum memberikan dampak yang signifikan secara menyeluruh, meskipun terdapat capaian positif di beberapa desa atau komunitas yang aktif. Partisipasi masyarakat masih bersifat sporadis dan sangat tergantung pada keberadaan tokoh penggerak atau fasilitator lokal. Secara umum, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat namun membutuhkan penguatan dalam aspek pelaksanaan, pendanaan, edukasi, dan sistem evaluasi untuk dapat berkontribusi lebih optimal dalam mewujudkan Gresik sebagai Kabupaten Hijau secara berkelanjutan.

Setelah menggambarkan kondisi lapangan dan menguraikan penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat berdasarkan pendekatan CIPP, pembahasan dilanjutkan dengan identifikasi faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Pemahaman terhadap kedua aspek ini menjadi penting karena implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya di tingkat pelaksanaan. Dalam konteks Kabupaten Gresik, upaya menuju “Kabupaten Hijau” melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan langkah strategis yang menuntut keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga warga. Namun, seiring dengan pelaksanaan kebijakan ini, ditemukan bahwa tidak semua wilayah menunjukkan tingkat keberhasilan yang seragam. Beberapa desa berhasil menginisiasi program pengelolaan sampah yang aktif dan berkelanjutan, sementara wilayah lain justru mengalami stagnasi atau tidak memulai sama sekali. Kondisi ini menandakan adanya perbedaan dalam hal kapasitas, sumber daya, dukungan kebijakan, serta dinamika sosial di masing-masing wilayah.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan ini mencakup keberadaan kebijakan formal (seperti perda dan SK bupati), partisipasi aktif tokoh masyarakat dan komunitas lokal, infrastruktur yang memadai di sebagian wilayah, serta adanya dukungan awal dari pemerintah daerah (Firmansyah et al., 2024). Dalam beberapa kasus, inisiatif warga dan peran LSM turut memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif dan sistem pengelolaan

sampah berbasis komunitas. Namun, di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang signifikan. Kurangnya sosialisasi yang merata, minimnya pelatihan teknis bagi pengelola sampah lokal, keterbatasan anggaran daerah, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Selain itu, budaya membuang sampah sembarangan yang masih mengakar di sebagian masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perilaku memerlukan waktu dan pendekatan edukatif yang berkelanjutan.

Rendahnya ketersediaan fasilitas pengolahan sampah, seperti TPS3R, tempat pemilahan, dan sarana transportasi sampah, juga menjadi hambatan dalam mendukung operasional kebijakan di lapangan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, kesadaran masyarakat yang sudah terbentuk pun sulit untuk diwujudkan dalam tindakan nyata. Selain itu, beberapa wilayah juga masih bergantung pada peran individu atau tokoh penggerak. Hal ini membuat keberlanjutan program rentan terhadap perubahan personal, misalnya ketika tokoh tersebut tidak lagi aktif atau berpindah tempat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang berperan dalam mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Harpi (2022), Rangkuman faktor-faktor tersebut disajikan dalam Tabel 3 berikut, guna memberikan gambaran menyeluruh yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan lanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor demi tercapainya tujuan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Hijau yang berkelanjutan.

Tabel 4 : Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gresik

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor penghambat
Kebijakan dan Regulasi	Tersedianya Perda dan SK Bupati terkait pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi di lapangan
Kelmbagaan	Adanya inisiatif pembentukan bank sampah dan kelompok pengelola di beberapa desa	Kurangnya pelatihan dan pendampingan kelembagaan secara berkelanjutan
Partisipasi Masyarakat	Dukungan tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan lokal	Rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pentingnya pengelolaan sampah mandiri
Infrastruktur	Beberapa	Masih

	wilayah memiliki TPS3R dan peralatan dasar pengelolaan	minimnya sarana seperti tempat pemilahan, transportasi, dan fasilitas daur ulang
Dukungan Pemerintah	Komitmen awal dari dina terkait dalam mendorong program partisipatif	Terbatasnya anggaran dan minimnya koordinasi lintas sektor
Sosialisasi dan Edukasi	Adanya program kampanye lingkungan dan pelatihan sporadis	Sosialisasi belum merata dan tidak berkelanjutan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kekuatan kolaboratif antara kebijakan yang tersedia, dukungan sosial, kesiapan infrastruktur, dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor pendukung yang menonjol mencakup keberadaan regulasi formal seperti Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Bupati, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program. Selain itu, terdapat peran aktif tokoh masyarakat, penggerak lingkungan, dan beberapa komunitas lokal yang berhasil membangun sistem pengelolaan sampah mandiri, seperti bank sampah dan TPS3R (Harpi, 2022). Infrastruktur pendukung di beberapa wilayah juga membantu memperlancar proses pemilahan dan pengumpulan sampah. Di sisi lain, dukungan awal dari pemerintah daerah, meskipun terbatas, menunjukkan komitmen terhadap tujuan Gresik sebagai Kabupaten Hijau.

Namun di balik pencapaian tersebut, masih banyak tantangan yang menghambat kelangsungan dan pemerataan program. Beberapa kendala utama meliputi terbatasnya alokasi anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya pelatihan bagi pengelola lokal, serta kurangnya fasilitas pengelolaan sampah di banyak wilayah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan belum meratanya sosialisasi menyebabkan banyak warga belum memahami peran penting mereka dalam sistem ini. Ketergantungan terhadap individu atau tokoh penggerak juga menjadi kelemahan struktural dalam jangka panjang, karena keberhasilan program sering kali tidak berkelanjutan jika tidak ada regenerasi kepemimpinan komunitas. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan di Gresik, dibutuhkan penguatan dari kedua sisi: memperbesar faktor

pendukung sekaligus mengatasi faktor penghambat secara strategis. Perbaikan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi publik, serta penyediaan infrastruktur dan dana yang cukup harus menjadi prioritas dalam kebijakan lanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa implementasi program tersebut menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu aspek utama yang menjadi kendala adalah rendahnya tingkat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif warga. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam proses pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga tingkat kesadaran dan keterlibatan mereka masih tergolong rendah. Partisipasi masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh keberadaan tokoh lokal dan pendamping dari lembaga swadaya masyarakat, sehingga tanpa dukungan aktor tersebut, keterlibatan cenderung pasif. Dari sisi kelembagaan, keberadaan bank sampah dan kelompok pengelola di sejumlah desa menjadi indikator positif, tetapi keberadaannya masih belum merata dan belum didukung secara optimal melalui pelatihan serta pendampingan berkelanjutan. Dukungan pemerintah daerah juga masih terbatas, terutama terkait anggaran, monitoring, dan sinergi antarinstansi yang belum maksimal. Selain itu, kekurangan fasilitas pendukung seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPS3R) dan peralatan menjadi hambatan utama dalam mempercepat keberhasilan program. Masalah teknis dan sosial seperti kurangnya tenaga ahli dan budaya membuang sampah sembarangan turut memperlambat perubahan perilaku masyarakat menuju kebiasaan hidup bersih dan ramah lingkungan.

Meskipun begitu, berbagai kebijakan formal dan inisiatif sudah diimplementasikan, dan keberhasilan program sangat bergantung pada peningkatan edukasi, penguatan kelembagaan, partisipasi aktif masyarakat, serta infrastruktur yang memadai. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan triangulasi data untuk memastikan akurasi dan kredibilitas hasil, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program. Dengan hasil evaluasi yang holistik ini, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif serta meningkatkan partisipasi masyarakat guna mewujudkan Gresik sebagai Kabupaten Hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R., & Kurniawan, B. (2020). Implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle Lestari Rahayu Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Periode 2019-2020. *Publika*, 12(1), 119–134.
- Adicita, Y., Sari, M. M., & Suryawan, I. W. K. (2023). Evaluasi Efektivitas dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Kompos di Kabupaten Bintan. *Envirotek: Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, 15(2), 136–140.
- Adnyana, Y., Sulandari, S., & Astawa, I. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64.
- Aisah, N., Fadillah, A. F., Kayla, M. A., & Putri, W. A. (2024). Evaluasi Program Pemilahan Sampah Di Lingkungan Kampus Iain Syekh Nurjati Tantangan Dan Strategi Perbaikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6), 88–93.
- Anugerah, M. F., Yahya, M. R., & Syahrier, F. A. (2024). Studi Evaluatif Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Pasca di Terbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. *Sumur: Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 27–37.
- Ardiansyah, N., Taufiq, M., Hendra, Adilansyah, & Rizkiani, F. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman Di Kota Bima. *Indonesia Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 60–67.
- Asshiddiqy, F., & Fikri, R. (2024). Implementasi Program Bank Sampah Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 143–151.
- Aulia, Y., Muhammad, F., Anwar, A., & Hamzah, D. (2023). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengolahan Sampah Organik Sebagai Upaya Pengurangan Sampah. *JoCE; Journal of Community Education*, 1(1), 1–5.
- Firmansyah, M. A., Ana, P., Novebriani, P. C., Kartika, P., Roja'i, P. S. B., Lestari, S., & Rahmatullah. (2024). Memperkuat Komunitas Melalui Program Pengelolaan Sampah untuk Keberlanjutan di Desa Suka Makmur. *Bumi : Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 128–137.
- Hadomuan, M. T., & Tuti, R. W. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14.
- Hamim, A., Rismayanti, S., Carlos, M. G., & Hamdan, A. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah di Kota Tasikmalaya. *Lifelong Education Journal*, 2(1), 1–10.
- Harpi, H. (2022). Evaluasi Program Tps 3R (Reduce, Reuse Dan Recycle) Di Kelurahan Pasar Baru Baserah Kabupaten Kuantan Singingi. *Jupersatek*, 5(1), 67–72.
- Haryadi, A. D., Abidin, Z., & Ristala, H. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Timbunan Sampah Dengan Prinsip 3R Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Cimahi. *Jurnal Praxis Idealis*, 2(1), 1–10.

- Hasibuan, M. R., Siagian, S. P., & Wau, N. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi Pada Bank Sampah Induk Permatahati-DLH Kota Medan). *Journal Governance Opinion*, 6(2), 62–67.
- Kambio, F., & Saputra, I. A. (2024). Evaluasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Di Kecamatan Mantikulore. *Jurnal Gawalise: Geografi, Wilayah, Lingkungan Dan Pesisir*, 2(2), 110–123.
- Kusumaningtyas, D. A., Mulasari, S. A., & Rosyidah. (2025). Screening Dan Evaluasi Program Bank Sampah Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Dan Pengelolaan Lingkungan*, 1(1), 39–50.
- Labibah, L. L., & Pulungan, M. A. (2025). Evaluasi Pengelolaan Sampah Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamis di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains Dan Teknologi*, 10(1), 24–32.
- Mardius, Y. S., Rupiwardani, I., & Saktiawan, Y. (2024). Evaluasi Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Kalpataru Kabupaten Lumajang dalam Mendukung Ekonomi Sirkular. *Journal of Envi Science*, 8(2), 1–14.
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93–108.
- Maskuri, Ma'arif, S., & Fanan, A. (2020). Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi di Pesantren Mahasiswa. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 32–45.
- Mertayani, N. L., Sudarma, I. M., & Dwipayanti, N. M. U. (2025). Evaluasi dan Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Bumi Lestari*, 25(1), 50–64.
- Mursalin. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Makassar. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4831–4840.
- Nanda, R., Frinaldi, A., Rembrandt, & Lanin, D. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Air Dingin Berdasarkan Analisis SWOT dan Peraturan Lingkungan. *Jurnal Sains Dan Ilmu Terapan*, 7(2), 67–76.
- Naziyah, F. A., & Arif, L. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Masker. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 23–32.
- Nuraini, A. N., Amir, M., Pratama, R. A., & Anggaraini, D. (2024). Penanganan Sampah Rumah Tangga: Studi Deskriptif tentang Strategi Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton Tengah. *Pamarenda Public Administration and Government Journa*, 4(2), 239–255.
- Nursalam, N., Kamaruddin, R., Sumarni, Rau, S. R., Yasin, R. R., Wahyuni, S., Warni, W. W., Fajriani, U., Alimuddin, T., Herdiansyah, Basir, R., & Saputra, H. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Pemanfaatan Minyak Jelantah Menjadi Lilin Aroma Terapi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(8), 3553–3558.

- Putra, A. D., Wiryono, Budiyo, Susatya, A., & Uker, D. (2022). Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Tengah. *Naturalis – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 11(1), 1–11.
- Rahma, F., & Jumiati. (2025). Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Kwt Mama Ceria Di Nagari Pakandangan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(1), 1521–1529.
- Sari, M. D. N., & Megawati, S. (2024). Evaluasi Program Bank Sampah Sekar Mulya Di Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 12(1), 135–146.
- Setyoprambudi, T., Ngarawula, B., & Jatmikowati, S. H. (2025). Implementation of Regional Regulation Policy on Waste Management in Malang Regency. *ABM: International Journal of Administration, Business and Management*, 7(2), 183–193.
- Sitoresmi, N. A., & Karmilah, M. (2025). Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 59–74.
- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryan, D., & Masrich. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis Di Kota Bogor. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209–230.
- Tuhumury, S., Laurens, S., & Tuanaya, W. (2024). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Manajemen Penanganan Sampah Di Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Global Education*, 5(2), 1704–1717.
- Wafa, A., & Angin, R. (2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(1), 1–14.
- Wea, M. L. C., Rozari, P. I. De, & Tungga, C. A. (2024). Penggunaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wolowea Timur Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 5(2), 1–10.
- Widiyaningrum, P., Lisdiana, & Purwantoyo, E. (2025). Evaluasi Partisipasi Siswa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mendukung Program Sekolah Adiwiyata. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 74–82.
- Zatillah, R., & Mubarak, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kecamatan Padang Utara. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–9.